

**CRITICAL RESISTANCE OF KI HADJAR DEWANTARA AT DE EXPRESS NEWS
PAPER: A STUDY OF POSTCOLONIALISM**

**RESISTENSI KRITIS KI HADJAR DEWANTARA PADA SURAT KABAR DE
EXPRESS: SEBUAH KAJIAN POSTKOLONIALISME**

Akbar Al Masjid¹⁾, Trisharsiwi²⁾, Arya Dani Setiawan³⁾, Endah Marwanti⁴⁾

¹⁾Indonesia, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, almasjida@ustjogja.ac.id

²⁾Indonesia, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, trisharsiwi@ustjogja.ac.id

³⁾Indonesia, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, arya.dani@ustjogja.ac.id

⁴⁾Indonesia, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, endahmarwanti3@gmail.com

Article history: Received 19 Agustus 2023
Accepted 19 Desember 2023

Revision: 6 September 2023
Available online Desember 2023

ABSTRACT

Postcolonialism literary criticism is a critical approach to literature that involves the historical context of colonialism and its impact on culture, identity, and power. Postcolonial literary criticism also helps provide an understanding of the concept of 'the Other', i.e., the way in which colonial culture denigrates and belittles other cultures outside its nation. This study aims to examine the article by Ki Hadjar Dewantara written in the newspaper Express with an approach to literary criticism of postcolonialism. This type of research is a descriptive qualitative literature study with an analysis method, namely content analysis. The source of this research data is an article entitled "Als ik een Nederlander was" or "If I Were a Dutchman," written by Ki Hadjar Dewantara (KHD) and published in De Express Newspaper on July 13, 1913. The research data is in the form of discourse quotes contained in the article. Data collection techniques include read, listen, and record techniques. The findings contained resistance in the form of mimicry, hybridity, and ambivalence. The resistance to mimicry or imitation shown by KHD is included in the category of closed or covert reciprocity because the rejection of the policies implemented by the Dutch government is opposed by writing that contains subtle but sharp satire. Hybridity resistance is found in the choice of KHD diction that deliberately explores and contrasts the words inlander-nederlander, freedom and slavery, freedom and oppression. The ambivalence resistance that was found was KHD, who initially wanted to become a Dutchman with his various arguments that flattered as well as satirized and gave condemnation to the colonial nation as KHD's strategy in awakening the patriotism and nationalism of the Indonesian people to fight for independence.

Keywords: ambivalence, hybridity; mimicry; postcolonialism; resistance

ABSTRAK

Kritik sastra postkolonialisme merupakan suatu pendekatan kritis terhadap sastra yang melibatkan konteks sejarah kolonialisme dan dampaknya terhadap budaya, identitas, dan kekuasaan. Kritik sastra postkolonialisme juga membantu memberikan pemahaman tentang konsep 'the Other', yaitu cara di mana budaya kolonial merendahkan dan meremehkan budaya lain di luar bangsanya yang dianggap sebagai "lainnya". Penelitian ini bertujuan mengkaji artikel Ki Hadjar Dewantara yang ditulis di sebuah Surat Kabar de Express dengan sebuah pendekatan kritik sastra Postkolonialisme. Jenis penelitian ini merupakan kajian kepustakaan kualitatif deskriptif dengan metode analisis yakni content analysis. Sumber data penelitian ini berupa artikel yang berjudul "Als ik een Nederlander was" atau "Seandainya Aku Seorang Belanda" yang ditulis oleh Ki Hadjar Dewantara (KHD) dan diterbitkan pada Surat Kabar De Express pada tanggal 13 Juli 1913. Adapun data penelitian berupa kutipan wacana yang terdapat dalam dalam artikel tersebut. Teknik pengumpulan data dengan teknik baca/simak dan catat. Hasil temuan terdapat resistensi berupa mimikri, hibriditas dan ambivalensi. Resistensi mimikri atau peniruan ditunjukkan oleh KHD termasuk dalam kategori resistensi tertutup atau terselubung karena penolakan atas kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah belanda dilawannya dengan sebuah tulisan yang mengandung sindiran yang halus namun tajam. Resistensi hibriditas ditemukan pada pemilihan diksi KHD yang sengaja mengeksplorasi dan mengkontraskan kata-kata, inlander-nederlander, kemerdekaan dan perbudakan, kebebasan dan penindasan. Resistensi ambivalensi yang temukan yakni KHD yang awalnya ingin menjadi seorang Belanda dengan berbagai argumen-argumennya yang menyanjung sekaligus menyindir dan memberikan kecaman kepada bangsa colonial sebagai strategi KHD dalam membangkitkan patriotisme dan jiwa nasionalisme rakyat Indonesia untuk berjuang merebut kemerdekaan.

Kata Kunci: ambivalensi; hibriditas; mimikri; postkolonialisme; resistensi

PENDAHULUAN

Soewardi Soeryaningrat, beliau dilahirkan di Yogyakarta putera dari KPH Soeryaningrat dan merupakan cucu dari KGPAA Paku Alam Ke-III (Buntarsono, 2017). Sehingga KHD termasuk keturunan ningrat dari Keraton Pakualaman, Yogyakarta. Berkat perjuangan dan jasanya dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia beliau dikenang dan mendapat penghargaan sebagai Bapak Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Kini, hari kelahiran beliau diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional (HARDIKNAS). Selain ulet sebagai seorang wartawan muda, KHD juga aktif dalam organisasi sosial dan politik. Sejak berdirinya Boedi Oetomo tahun 1908, beliau aktif di seksi propaganda untuk menyosialisasikan dan menggugah kesadaran bangsa Indonesia mengenai pentingnya persatuan-kesatuan dan nasionalisme. Sehingga oleh pemerintah Kolonial Belanda sering dianggap sebagai provokator.

Pada tahun 1913, tepatnya bulan November, pemerintah kolonial Belanda berencana menyelenggarakan perayaan besar memperingati 100 tahun kemerdekaan Belanda dari pendudukan Perancis. Ironisnya, perayaan besar tersebut akan berlangsung di Indonesia, yang merupakan negara wilayah jajahan Belanda. Lebih parah lagi, pemerintah kolonial ingin memungut uang dari rakyat "Bumiputra" untuk biaya pesta perayaan tersebut (Dewantara, 2013).

Soewardi Soerjaningrat, juga dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara, menulis karya berjudul "*Als ik een Nederlander was*" (Andai aku seorang Belanda) sebagai reaksi atas rencana Belanda yang ingin mengadakan pesta kemerdekaan di tanah Hindia (Indonesia sebelum merdeka) dan melakukan pemungutan dana dari rakyat pribumi. Tulisan itu aslinya dalam bahasa Belanda dan dimuat surat kabar De Express pada 13 Juli 1913, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh Abdoel Moeis, dan disebarluaskan ke seluruh wilayah sehingga orang dapat menghargai isi dari tulisan pergerakan yang bertujuan untuk memberi tahu rakyat Indonesia tentang penindasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Tulisan itu sangat tajam mengeritik dan menyindir kolonialis Belanda. Tulisan itu menentang perayaan kemerdekaan Belanda yang "memungut biaya" dari penduduk pribumi. Seandainya Soewardi Soerjaningrat orang Belanda, tulisan ini menentang gagasan peringatan kemerdekaan Belanda tersebut. Ia menyatakan bahwa merayakan ulang tahun kemerdekaan Belanda di wilayah koloni adalah ide yang salah dan merendahkan harga dirinya. Karena kritik KHD melalui tulisan tersebut, ia ditangkap dan diasingkan ke Negeri Belanda.

Surat kabar *De Expres* yang dimiliki *Indische Partij* (IP) menerbitkan catatan panjang yang isinya membuat pemerintah kolonial marah. Pemerintah Kolonial Belanda sangat emosi. Pihak Kejaksaan mulai menyita brosur itu pada 20 Juli 1913 dan memusnahkannya. Abdoel Moeis, Soewardi Soerjaningrat, dan Tjipto Mangoenkoesoemo diminta segera menghadap Jaksa Tinggi. Setelah Tjipto Mangoenkoesoema dan rekannya ditangkap pada 29 Juli 1913, polisi melakukan razia di berbagai tempat. Tercatat dalam telegraf tertanggal 30 Juli 1913 bahwa Wignja Disastra, pemimpin redaksi Kaoem Moeda, dan anggota Komite Boemi Poetera Tjipto Mangoenkoesoemo, Soewardi Soerjaningrat, dan Abdoel Moeis, semuanya ditangkap kemarin sore oleh polisi.

Sebagian tulisan tersebut berbunyi, "Andai aku orang Belanda, tidaklah aku akan merayakan kemerdekaan bangsaku di negeri yang rakyatnya tidak kita beri kemerdekaan... Andai aku orang Belanda, pada saat ini juga aku memprotes hajat mengadakan peringatan itu. Aku akan mengingatkan kawan-kawanku di koloni, bahwa berbahaya di waktu ini mengadakan perayaan-perayaan kemerdekaan itu..., aku bukan seorang Belanda; aku hanya seorang putera dari negeri ini, seorang pribumi di negeri jajahan Belanda ini; karena itu aku tidak akan protes."

"*Als ik een Nederlander was*" atau "Seandainya Aku Seorang Belanda," demikian judul artikel Soewardi Soerjaningrat yang terbit edisi 13 Juli 1913. Dalam rangkaian kalimat bergaya satire, Soewardi menyindir halus namun tajam keinginan Kolonial Belanda memperingati seratus tahun kemerdekaan Belanda dari Perancis. Dalam tulisan tersebut, KHD sengaja mempermainkan ***inlander-Nederlander***, **perbudakan-kemerdekaan**, **penindasan-kebebasan**, yang pada intinya tulisan Seandainya Aku Bangsa Belanda itu menentang perayaan kemerdekaan Belanda melibatkan rakyat pribumi/koloni. Pernyataan keberatan dengan perayaan hari kemerdekaan di tanah air rakyat terjajah

menjadi senjata tajam untuk menghina bangsa Belanda. Tentu saja banyak kaum konservatif Belanda yang marah dengan artikel tersebut dan menanggapi dengan hinaan dan cacik, bahkan pencelakaan.

Melihat cuplikan tulisan KHD dan pembahasan awal di atas, sangat tepat kiranya tulisan KHD tentang “**Seandainya Aku seorang Belanda**” yang dimuat di surat kabar *De Express* dikaji lebih mendalam dengan pendekatan Kritik Sastra Postkolonialisme. Masalah utama yang menjadi fokus dalam pembahasan ini adalah bagaimana bentuk resistensi postkolonialisme (mimikri, hibriditas dan ambivalensi) direpresentasikan pada artikel “Seandainya Aku seorang Belanda”. Teori postkolonial dianggap relevan dalam penelitian mutakhir. Kajian-kajian budaya tentang kolonialisme menarik perhatian peneliti dalam menganalisis strategi perlawanan pribumi terhadap kolonial. Penelitian dengan menggunakan teori postkolonial menjadi hal penting dalam mengungkap fenomena kolonialisme. Hal ini rupanya sejalan dengan pendapat Hermaliza & Ermawati (2020) yang menyampaikan bahwa berbagai pemberitaan tentu saja ini tidak lepas dari unsur kekuasaan dan ideologi yang di dalamnya mengandung unsur ufemisme yang dipolitisasi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah postkolonial. Penelitian ini termasuk penelitian studi kepustakaan dengan menggunakan metode *content analysis* atau analisis isi. Analisis isi, menurut Krippendorff dalam Alber dkk (2018:2), adalah metode penelitian yang memungkinkan penciptaan inferensi-inferensi yang sah dan dapat ditiru dari data dengan mempertimbangkan konteksnya. Penggunaan metode analisis isi (*content analysis*) ini disebabkan fakta bahwa penelitian tidak hanya menampilkan data sesuai dengan fakta atau hasil tetapi juga melihat data melalui aspek simbolik seperti konteks. Sumber data primer dalam penelitian ini diambil dari tulisan Ki Hadjar Dewantara yang berjudul “*Als ik een Nederlander was*” atau “Seandainya Aku Seorang Belanda” yang diterbitkan pada Surat Kabar *De Express* pada tanggal 13 Juli 1913. Sedangkan data sekunder yang mendukung analisis ini diperoleh dari buku, jurnal, artikel, dan berbagai sumber data lain yang relevan. Adapun data penelitian berupa kata, frasa, klausa, kalimat, maupun wacana yang terdapat dalam dalam artikel “Seandainya Aku Seorang Belanda”. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik baca catat, yang dilakukan secara cermat dengan cara memberi tanda pada teks dan memilah-milahnya sesuai topik analisisnya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis data model interaktif Miles dan Huberman, et al. (2014) yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kritik Sastra, Postkolonial

Kritik sastra mempunyai fungsi sebagai alat untuk memberikan pemahaman terhadap isi sebuah karya sastra agar pembaca dapat memahami tendensi-tendensi yang tersirat dalam sebuah karya/tulisan. Kritik sastra dapat membuat pembaca karya sastra mengerti pesan-pesan yang disampaikan dalam sebuah karya sastra (Andriyani & Piliang, 2019). Kajian kritik sastra *postkolonial* melihat bagaimana sastra mengungkapkan jejak perjumpaan kolonial, yaitu konflik antarras, bangsa, dan budaya dalam konteks hubungan kekuasaan yang tidak seimbang; ini telah menjadi bagian penting dari pengalaman manusia sejak awal imperialisme Eropa (Foulcher & Day, 2008). Jadi, menurut Foulcher dan Day, kritik *postkolonial* adalah pendekatan pengkajian karya sastra yang mempertimbangkan kolonialisme dan dampaknya terhadap teks sastra.

Jika dicermati, tentu banyak karya sastra modern Indonesia yang menelusuri jejak kolonialisme Bangsa Eropa dan Asia Timur Raya sepanjang sejarahnya (Santosa, 2012). Berdasarkan kenyataan bahwa Indonesia pernah menjadi bagian dari kolonialisme atau negara jajahan selama ratusan tahun dan banyak karya sastra yang mencatat jejak-jejak kolonialisme, maka sastra Indonesia modern tentu saja menjadi rujukan kajian *postkolonialisme*. Atas dasar pemahaman tersebut kritik *postkolonial* lahir oleh tokoh-tokoh seperti oleh Gayatri Chakravorty Spivak, Edward W. Said, dan Homi Babha. Pendekatan *poststrukturalisme* pada kritik sastra, filsafat kontinental, psikoanalisis, teori feminis, Marxisme, dan post-Marxisme adalah bagian dari kritik postkolonial Spivak.

Runtuhnya kolonialisasi dalam dunia sastra memunculkan gerakan baru bernama studi pascakolonial atau postkolonial. Ciri dari gerakan ini adalah menguatnya ide mengenai kesadaran

individu, kemerdekaan dari hegemoni, dan pengembalian hak tanah termasuk kebudayaannya ke tangan terjajah atau pribumi. Kolonialisasi yang akar katanya dari koloni, tidak hanya merangsek dengan mengkoloni tempat dan mendaulatnya, tetapi juga menghegemoninya secara kognitif. Salah satu yang menjadi ciri penting dari kolonialisasi adalah pembatas antara “beradab” dan “tidak beradab”(Selden et al., 2016).

Dalam pengertian yang lebih luas, "postkolonial" juga mengacu pada hal-hal yang sebelum dan sesudah kolonialisme. Oleh karena itu, Ratna (2008) mengemukakan lima pokok pengertian pascakolonial dalam bukunya "*Postkolonialisme Indonesia Relevansi Sastra*", yaitu (1) memperhatikan analisis era kolonial, (2) memiliki hubungan dengan nasionalisme, (3) mengemukakan lima pokok pengertian postkolonial, yaitu (1) menaruh perhatian untuk menganalisis era kolonial, (2) memiliki kaitan erat dengan nasionalisme, (3) memperjuangkan cerita-cerita kecil, menghimpun kekuatan dari bawah, serta belajar dari masa lalu untuk melangkah ke masa depan, (4) menumbuhkan kesadaran bahwa penjajahan tidak hanya bersifat material tetapi juga psikologis, dan (5) tidak sekedar teori, namun sadar bahwa masih banyak pekerjaan penting yang harus dilakukan, seperti melawan imperialisme kolonialisme, orientalisme, rasisme dan masih banyak lagi bentuk-bentuk 'hegemoni' lainnya.

Sastra postkolonial secara umum mempunyai dua periodik, yaitu sastra yang lahir dari masa kolonial (Balai Pustaka) dan sastra yang lahir pada masa pascakolonial, namun dengan unsur cerita yang berkaitan dengan topik kolonialisme dan penjajahan Eropa. Secara umum, postkolonial adalah istilah yang digunakan untuk menyebut masa pascakolonial. Sebagai sastra postkolonial dengan menggunakan definisi sempit, sastra postkolonial dapat dipahami sebagai karya sastra yang mencerminkan kesadaran pascakolonial dan semangat perlawanan terhadap ketidakadilan atas kolonialisasi (Efendi, 2016). Bidang kajiannya termasuk karya sastra itu berisi kisah kekuasaan kolonial dari awal penjajahan hingga saat ini (Wardani & Widyahening, 2020). Sastra pascakolonial dapat dipahami sebagai sastra yang mencerminkan kesadaran pascakolonial dan semangat perlawanan terhadap ketidakadilan global. Artinya karya sastra pascakolonial merupakan semacam analisis kritis berbentuk karya sastra yang ditulis oleh sastrawan yang sadar akan kondisi pascakolonial dan segala kekhasannya (Bandel, 2013).

Dalam perkembangan selanjutnya, pandangan-pandangan yang mengekskiskan teori poskolonialisme adalah Gayatri C. Spivak (2003) melalui tulisannya "*Can The Subaltern Speak?*" yang memandang bahwa kemerdekaan sebuah negara masih memposisikan kelas subaltern sebagai bayang-bayang saja. Pandangan Spivak ini dikomentari oleh Bhaba (1994) dalam bukunya yang berjudul "*The location of Culture*". Bhaba justru berpandangan bahwa kelas subaltern sesungguhnya sudah dapat bersuara dari perilaku apropriasi yang telah dilakukannya. Perilaku ini disebut dengan istilah mimikri. Bhaba memandang bahwa mimikri yang dilakukan oleh kelas *subaltern* dalam upaya menjatuhkan kekuasaan kolonial (penguasa). Bhaba menawarkan konsep lain dari kajian poskolonialisme. Ia menawarkan tiga aspek utama dalam mengkaji karya sastra kolonial. Ketiga aspek tersebut yaitu hibriditas, mimikri, dan ambivalensi. Hibriditas berkenaan persilangan budaya penjajah dan terjajah. Mimikri berkenaan pengaruh atas budaya penjajah terhadap budaya kaum terjajah. Ambivalensi berkenaan pencarian identitas kaum terjajah atas kesadaran keterjajahannya.

Loomba (2003) menjelaskan bahwa poskolonialisme diartikan sebagai perlawanan terhadap dominasi kolonial dan warisan-warisannya yang tetap ada hingga saat ini. Bangsa yang baru merdeka hanya membagikan keadilan secara selektif dan timpang kepada rakyat. Penggulingan/peruntuhan pemerintah kolonial tidak secara otomatis membawa perubahan ke arah perbaikan status perempuan, kelas pekerja atau petani dikebanyakan negara jajahan. Lo and Gilbert (1998) menyatakan bahwa teori poskolonial mencakup tiga kemungkinan pilihan perhatian, yaitu (a) pada kebudayaan masyarakat-masyarakat yang pernah mengalami penjajahan Eropa, baik berupa efek penjajahan yang masih berlangsung sampai pada masa poskolonial maupun transformasinya ke dalam bentuk-bentuk yang disebut neokolonialisme, (b) respons perlawanan atau wacana tandingan dari 10 masyarakat terjajah terhadap penjajahan itu, tanpa menghilangkan perhatian pada kemungkinan adanya ambiguitas atau ambivalensi, dan (c) segala bentuk marginalitas yang diakibatkan oleh segala bentuk kapitalisme.

Said (2003) menyampaikan bahwa sifat poskolonialisme adalah melawan, menggugat, dan menolak segala bentuk penindasan sebab bagi Said hubungan antara barat dan timur adalah hubungan kekuatan, dominasi, hubungan berbagai derajat hegemoni yang kompleks dengan kata lain,

poskolonialisme sebagai sebuah pendekatan yang bersifat counter-discursif (wacana tandingan) terhadap wacana kolonialisme (Edward, 2003).

Mimikri adalah strategi perubahan, peraturan dan disiplin yang menyesuaikan diri dengan “yang lain” karena mimikri itu memvisualkan kekuatan. efek dari mimikri itu terhadap kekuasaan dari wacana kolonial sangat dalam dan mengganggu). Kehadiran mimikri bukan dalam upaya membangun harmonisasi, melainkan menciptakan perlawanan-perlawanan Hasrat (Bhabha, 1994).

Resistensi adalah sikap tindakan dari golongan masyarakat kelas rendah dengan maksud melunakkan atau menolak tuntutan-tuntutan (misalnya sewa pajak) yang dikenakan golongan kelas atas (misalnya tuan tanah, kelompok dominant, atau penguasa) atau merujuk kepada situasi sosial dimana pihak-pihak yang dirugikan dalam struktur sosial masyarakat kemudian melakukan perlawanan terhadap pihak-pihak yang merugikannya. Resistensi merupakan perlawanan masyarakat terjajah terhadap kekuasaan kolonial. Resistensi dicirikan oleh adanya rencana-rencana pergerakan yang terorganisasi, yang dilakukan dengan menyerang secara langsung melalui peperangan atau dengan memproduksi teks atau bacaan (Lo & Gilbert, 1998). Kontrol kolonial sangat kuat mengikat kaum terjajah. Pada dasarnya semua wacana kolonial selalu ada dalam oposisi biner, yakni penjajah atau terjajah, beradab atau biadab, hitam atau putih dalam usaha melaksanakan cita-citanya untuk melakukan eksploitasi ekonomi secara politis (Ashcroft, 2001).

Resistensi dapat dipahami sebagai respons terhadap inisiatif perubahan, respons yang muncul dari rangsangan yang membentuk realitas kehidupan individu. Menurut Scott, resistensi dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung. Faktor-faktor ini termasuk budaya dan ekonomi, struktur sosial, hubungan masyarakat, lingkungan, dan sarana sosial. (Susilowati, 2019). Dalam artikel ini, perlawanan dipahami sebagai penolakan terhadap kolonialisme. Kolonialisme saat ini tidak hanya berarti perang fisik tetapi juga perang politik, sosial, budaya, ekonomi, globalisasi, pendidikan, dan dunia maya. Segala bentuk tindakan yang mengarah pada ketidakadilan, penindasan, dan kesewenang-wenangan, baik secara individu maupun kolektif, dapat dianggap sebagai tindakan kolonialisme.

Istilah "subaltern" biasanya mengacu pada orang-orang yang berada di luar struktur kekuatan hegemonik bangsa kolonial dari segi sosial, politik, dan geografis. Antonio Gramsci pertama kali menggunakan istilah ini, terutama dalam karyanya tentang "hegemoni kultural", yang mengidentifikasi kelompok yang dieksklusi, dikucilkan, dan dikecualikan dalam struktur sosial. Berdasarkan konotasi negatif tersebut, Spivak mengembangkan bahwa "subaltern" bukan hanya istilah berkelas yang mengacu pada kelas yang tertindas atau kelompok "the other". Menurutnya, istilah "subaltern" mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan akses. Istilah ini menciptakan ruang yang membedakan siapa yang memiliki kuasa dan siapa yang tidak. Secara implisit, Spivak (1998: 24) mempertanyakan tentang keterlibatan akademisi dengan subaltern. Menurutnya, untuk menunjukkan keterlibatan yang sebenarnya dengan subaltern, para akademisi harus meninggalkan citra mereka sebagai pakar di tengah hubungan sosial biner, termasuk hubungan antara pusat dan pinggiran, serta semua jenis oposisi biner lainnya.

Antonio Gramsci membuat istilah "*sub-altern*" untuk orang-orang yang tertindas, yang berarti "inferior", subjek yang didominasi, atau lebih tepatnya, orang-orang inferior. (Gandhi, 2019). *Sub-altern* juga didefinisikan sebagai “orang yang bukan bagian dari kelas atas”, sedangkan kelas atas adalah “kelompok dominan yang terdiri dari orang asing maupun penduduk asli” (Guha & Spivak, 1988). Studi subaltern menurut Spivak (1998) menekankan perbedaan yang ditemukan antara teori yang diterapkan dan praktik. Dalam esainya yang berjudul "*Can the Subaltern Speak?*" Spivak, sangat jelas bahwa menggabungkan konteks lain dalam sistem-sistem representasional yang kompetitif menghilangkan figur *sub-altern* yang didengarkan (Gandhi, 2019). Spivak menggunakan istilah "*sub-altern*" untuk mengacu pada orang atau kelompok yang tidak dapat mengakses kekuasaan hegemonik, seperti perempuan, buruh, petani, dan orang miskin lainnya.

Masalah utama subaltern tidak hanya terkait dengan kelas orang yang tertindas atau pekerja yang tertindas tetapi juga tentang akses yang membatasi suara mereka (Setiawan, 2018). Misalnya, seorang pemimpin demonstrasi yang berbicara tentang hak asasi kelas pekerja atau perempuan, entah orang kaya atau miskin, dapat dianggap subaltern ketika suara mereka tidak terwakili dan tidak memiliki kebebasan berbicara.

Subjek subaltern atau masyarakat yang tertindas tidak dapat menyuarakan pendapat mereka sendiri, menurut Spivak (1998). Loomba dan Hadikusumo (2003) menyatakan bahwa mereka tidak dapat mewakili diri mereka sendiri, dan bahkan ketika mereka berbicara, pertanyaannya adalah

apakah mereka berbicara karena ketidakberdayaan mereka terhadap kolonialisme. Selain itu, kolonialisme secara historis bertemu dengan budaya patriarki, masalah rasial, dan gagasan kemajuan, yang selalu digunakan oleh penjajah kolonial untuk mendapatkan legitimasi di tanah jajahan mereka.

Pandangan penjajah terhadap terjajah merupakan wilayah orientalisme. Pandangan terjajah terhadap penjajah merupakan wilayah postkolonialisme. Karena itu, kelahiran postkolonialisme dipicu oleh kelahiran orientalisme. Orientalisme dan postkolonialisme bermuara pada kekuasaan. Orientalisme melihat bagaimana penjajah menguasai terjajah. Postkolonialisme melihat bagaimana terjajah melakukan perlawanan atas kekuasaan penjajah. Jika orientalisme lebih pada dominasi kekuasaan penjajah, postkolonialisme lebih pada bagaimana terjajah mengatasi dominasi penjajah atau kekuasaan penjajah. Jika orientalisme merupakan alat penjajah menguasai terjajah, postkolonialisme merupakan alat terjajah untuk membebaskan diri dari penjajah (Efendi, 2016).

1. Resistensi Mimikri

Bhabha, (1994) Mimikri kolonial adalah hasrat untuk subjek yang berbeda menjadi subjek yang hampir sama, tetapi tidak sepenuhnya sama *as subject of a difference, that is almost the same, but not quite*). Konsep mimikri Bhabha mengandung dilema karena kaum pribumi tidak hanya ingin membangun identitas persamaan dengan kaum penjajah, tetapi mereka juga mempertahankan perbedaan mereka. Mimikri muncul sebagai representasi dari perbedaan, atau proses pengingkaran.

Mimikri juga merupakan ketidakmampuan, perbedaan, atau perlawanan yang melekat pada fungsi strategis kekuasaan kolonial. Faktanya, imitasi juga mempunyai arti mengejek, meniru tetapi juga mengejek (Bhabha, 1994). Sikap mengejek ini juga menjadi salah satu cara masyarakat pribumi bersimpati kepada penjajah, rakyat, dan pimpinan. Bentuk resistensi mimikri ini dapat dilihat pada kutipan “**Seandainya Aku Orang Belanda**” berikut ini.

“Sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang telah kita rampas sendiri kemerdekaannya. Seajar dengan jalan pikiran itu, bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh si *inlander* memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. Ide untuk menyelenggaraan perayaan itu saja sudah menghina mereka, dan sekarang kita keruk pula kantongnya. Ayo teruskan saja penghinaan lahir dan batin itu! Kalau aku seorang Belanda, hal yang terutama menyinggung perasaanku dan kawan-kawan sebangsaku ialah kenyataan bahwa *inlander* diharuskan ikut mengongkosi suatu kegiatan yang tidak ada kepentingan sedikit pun baginya. Andai aku orang Belanda, pada saat ini juga aku memprotes hajat mengadakan peringatan itu. Aku akan mengingatkan kawan-kawanku di koloni, bahwa berbahaya di waktu ini mengadakan perayaan-perayaan kemerdekaan itu..., **aku bukan seorang Belanda**; aku hanya seorang putera dari negeri ini, seorang pribumi di negeri jajahan Belanda ini; karena itu aku tidak akan protes. (Dewantara, 2013)”

Dalam kutip tersebut KHD menggunakan gaya Bahasa *satire* atau sindiran untuk pemerintah Kolonial Belanda yang berencana ingin mengadakan pesta perayaan 100 tahun kemerdekaan bangsanya di tanah Hindia-Belanda (sebutan Indonesia sebelum merdeka). Tindakan semacam itu sudah merupakan penghinaan kepada kaum pribumi karena merayakan kemerdekaan di tanah orang jajahan ditambah lagi biaya atas pesta perayaan tersebut dibebankan kepada rakyat pribumi, hal ini tentu memancing kemarahan KHD, namun protes KHD ini tidak tidak secara lugas disampaikan tapi beliau menggunakan Bahasa yang halus namun dapat menusuk perasaan orang-orang colonial Belanda melalui tulisannya “Sekiranya aku seorang Belanda”. Dengan tulisannya itu pula KHD mampu membangunkan jiwa nasionalis orang-orang pribumi agar jangan mau diperlakukan sekehendak hati (diperintah, diperas, ditindas) oleh kaum penjajah, dan harus berani melawan dengan kecerdasan/ilmu untuk mewujudkan Indonesia yang merdeka. Dari tulisannya tersebut KHD kemudian dianggap sebagai provokator dan pembangkangan terhadap pemerintah Belanda saat itu. Akibatnya KHD mendapat hukuman buang ke Pulau Bangka. Namun atas permintaan Tiga Serangkai (Ki Hadjar Dewantara, Cipto Mangunkusuma, dan Dowses Deker) meminta hukumannya diganti dengan pengasingan ekstern. Permohonannya dikabulkan tiga serangkai tersebut akhirnya di buang ke negeri Belanda pada atahun 1913.

Dimulai dengan sindiran, berlanjut dengan kata-kata yang lebih tajam, lalu dipungkasi dengan kecaman tajam, berkata, "Sungguh, seandainya saya ini orang Belanda, maka saya tak akan pernah

mau merayakan pesta peringatan seperti itu di sini, di suatu negeri yang kita jajah." Kemerdekaan harus diberikan kepada rakyat yang tertindas terlebih dahulu. Baru setelah itu, kita dapat mengingat kemerdekaan kita sendiri!

Bentuk pelawanan melalui proses mimikri atau peniruan ditunjukkan oleh KHD, dengan keberanian mengungkapkan gagasan membuat KHD menjadi tokoh yang mampu mendobrak intelektual yang semata-mata hanya dimiliki oleh kaum penjajah. KHD dengan kecerdasan dan keberaniannya mencoba melawan Belanda dengan tulisannya, serta dengan tulisannya tersebut KHD mencoba membangkitkan jiwa patriotisme dan nasionalisme kaum pribumi.

Ada tiga jenis resistensi, menurut Scott: resistensi tertutup, resistensi semi terbuka, dan resistensi terbuka. Resistensi tertutup atau terselubung, yang bersifat simbolis atau ideologis, terdiri dari fitnah, penolakan, dan pemusnahan rasa hormat terhadap penguasa. Dalam tulisannya KHD termasuk dalam kategori resistensi tertutup atau terselubung karena penolakan atas kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Belanda dilawannya dengan sebuah tulisan yang mengading sindiran yang halus namun tajam.

2. Resistensi Hibriditas

Hibriditas menurut Bhabha (1994) adalah metafora untuk menggambarkan bergabungnya dua jenis (bentuk) yang memunculkan sifat-sifat tertentu dari masing-masing bentuk, sekaligus meniadakan sifat-sifat tertentu yang dimiliki keduanya. Selain itu, Bhabha memasukkan hibriditas, yang memungkinkan pengenalan identitas dan budaya baru. Oleh karena itu, hibriditas dapat dianggap sebagai alat untuk memahami perubahan budaya dengan memutuskan atau menciptakan kategori budaya secara temporer. Bentuk Hibriditas yang ditemukan dalam kutipan "Seandainya aku seorang Belanda" sebagai berikut.

Di berbagai surat kabar, Belanda banyak sekali melakukan propaganda untuk mengadakan suatu pesta besar perayaan seratus tahun kemerdekaan *Nederlander* atas Perancis di tanah Hindia (sebutan Indonesia saat masih dijajah Belanda). Selanjutnya KHD, menghimbau kepada penduduk negeri ini tidak boleh lengah begitu saja. Bahwa pada bulan November yang akan datang (tahun 1913) genaplah seratus tahun, bahwa Nederland menjadi suatu negara yang merdeka.

"Sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang telah kita rampas sendiri kemerdekaannya. Seajar dengan jalan pikiran itu, bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh si *inlander* memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. Hal yang terutama menyinggung perasaanku dan kawan-kawan sebangsaku ialah kenyataan bahwa *inlander* diharuskan ikut mengongkosi suatu kegiatan yang tidak ada kepentingan sedikit pun baginya.

Dalam artikelnya, KHD sengaja mengeksplorasi dan mengkontraskan kata-kata, *inlander-nederlander*, kemerdekaan dan perbudakan, kebebasan dan penindasan. Gagasan sebagai orang Belanda yang menentang perayaan Hari Kemerdekaan di tanah jajahan menjadi bumerang untuk menghina bangsa Belanda. Hal itu, tentu saja menjadikan kaum konservatif Belanda kebakaran jenggot (marah) membaca artikel tersebut dan menanggapi dengan cemoohan dan pencekalan

KHD mengubah perjuangan politik menjadi perlawanan pena. Ini bukan dengan menggerakkan massa untuk demonstrasi atau pemberontakan, tetapi dengan memberi orang pemahaman tentang pentingnya nasionalisme dan jiwa merdeka. Tulisan KHD ini tidak kalah tajam dari orasi yang diucapkan oleh orang-orang yang berpartisipasi dalam demonstrasi.

Foulcher dan Day (2008) mengemukakan ada dua topik utama pembahasan terkait kritik pascakolonial dalam sastra Indonesia, yaitu persoalan bahasa dan identitas. Masalah bahasa berkaitan dengan pengaruh bahasa kolonial terhadap bahasa terjajah, bagaimana sastra Indonesia mengungkapkan postkolonilitas, dan bagaimana penulis bekas jajahan menggunakan bahasa penjajahan besar untuk mendekolonisasi atau menyebarkan kesadaran kebangsaan. Sedangkan persoalan identitas terkait dengan masalah hibriditas, yang merupakan masalah jati diri bangsa yang berubah sebagai akibat dari pengaruh budaya bangsa kolonial; ini termasuk imitasi/mimikri atau meniru budaya kolonial oleh bangsa yang terjajah dan subaltern, atau kaum yang terpinggirkan (Mukhlis, 2018). Santosa (2009) menegaskan bahwa kesadaran kebangsaan/jati diri bangsa yang terbebas dari kolonialisme adalah sikap nasionalisme. Nasionalisme di wilayah jajahan merupakan reaksi terhadap berbagai tekanan politik dan sosial yang dilakukan penjajah.

3. Resistensi Bentuk Ambivalensi

Ambivalensi dipakai untuk menggambarkan hubungan kompleks antara penjajah dan yang terjajah. Dalam teori poskolonial ambivalensi dianggap hasrat menginginkan satu hal dan sebaliknya juga menolak hal tersebut dalam waktu yang bersamaan. Di satu sisi kaum terjajah memiliki keinginan untuk mencari jatidiri atau identitas mereka. Kaum terjajah berusaha melakukan perlawanan terhadap dampak buruk penjajahan yang mereka alami. Bentuk ambivalensi yang dapat ditemukan dalam "Seandainya aku seorang Belanda" sebagai berikut.

"Alangkah gembiranya, alangkah senangnya, dapat merayakan suatu hari nasional yang begitu besar artinya. Saya ingin, dapat kiranya sebentar menjadi seorang Belanda, bukan seorang "Staatsblad-Nederlander", tetapi seorang putra Nederland Besar yang tulen, sama sekali bebas dari cacat-cacat asing. Alangkah gembiranya aku, apabila nanti di bulan November datang hari yang sebegitu lama ditunggu-tunggu, hari perayaan kemerdekaan. Kegembiraan hatiku akan meluap-luap melihat bendera Belanda berkibar sesenang-senangnya dengan secarik Oranje di atasnya. Suaraku akan parau ikut serta menyanyikan lagu "wilhelmus" dan "wien Neerlands Bloed", apabila nanti musik mulai berbunyi. Saya akan menjadi sombong karena segala pernyataan itu, saya akan memuji Tuhan dalam gereja Kristen bagi segala kebaikan-Nya, saya akan meminta, memohon ke langit yang tinggi supaya Nederland kekal kekuasaannya..."

"Apabila saya seorang Belanda, saya tidak akan sanggup berbuat segala-galanya. memang saya berkehendak supaya pesta kemerdekaan yang akan datang itu diorganisasi seluas-seluasnya, tetapi saya tidak mau kalau bumiputra negeri ini ikut serta merayakan, saya akan melarang mereka ikut riang gembira pada pesta-pesta itu, malahan saya ingin sekali memagari tempat-tempat keramaian itu, supaya tak ada seorang bumiputra pun dapat melihat kegembiraan kita yang meluap-luap pada peringatan hari kemerdekaan itu."

"Apabila saya seorang belanda, saya tidak akan mengadakan pesta kemerdekaan dalam suatu negeri sedangkan kita menahan kemerdekaan bangsanya..."...Tetapi.....aku ini bukan seorang Belanda; aku hanya seorang putera dari negeri ini, seorang pribumi di negeri jajahan Belanda ini; karena itu aku tidak akan memprotes."(Dewantara, 2013)

Pada kutipan itu terjadi ambivalensi oleh KHD, yang awalnya KHD ingin menjadi seorang Belanda dengan berbagai argumen-argumennya yang menyanjung sekaligus menyindir dan memberikan kecaman atas rencana Belanda ingin mengadakan pesta kemerdekaan seratus tahun kebebasan mereka dari penjajahan Perancis. Namun, di satu sisi KHD menyatakan bahwa dirinya bukan seorang Belanda. Maksud KHD adalah memberikan kesadaran kepada rakyat Indonesia bahwa rencana yang akan dilakukan oleh pemerintah Belanda itu tidak benar, karena sama saja menginjak-injak harga diri rakyat pribumi. Di situlah strategi KHD dalam membangkitkan keberanian patriotisme dan jiwa nasionalisme rakyat Indonesia untuk berjuang merebut kemerdekaan.

SIMPULAN

Gaya Ki Hajar Dewantara (KHD) dalam melawan Belanda tidak membabi-butakan dalam melakukan serangan. "*Als ik een Nederlander was*" membuktikan bahwa ia adalah seorang pemberani dan penulis yang terampil. Mungkin ia radikal, tetapi itu tidak selalu brutal. Melalui tulisannya, KHD menampar namun tidak bersikap kasar. Ia tidak mengumpat, namun memberikan kata-kata yang tepat dan indah. Ada humor, ada sinis, ada ironi bercampur ejekan kasar, jelas ditujukan kepada masyarakat kolonial. Tulisan KHD tidak hanya nyinyir atau mengecam tanpa solusi. Tulisannya mengandung perspektif dan upaya penyadaran yang dapat dipertimbangkan oleh kedua pihak kolonial dan kaum pendukungnya, serta masyarakat Hindia yang masih terjajah. Di tahun 1913 itu, KHD sudah membuka kesadaran tentang cita-cita kemerdekaan, "Pribumi" bernyali tinggi tidak banyak *inlander* yang seberani KHD pada masa-masa itu.

Dalam penelitian terhadap artikel/tulisan KHD "*Als ik een Nederlander was*" ("Kalau saya seorang Belanda") peneliti menemukan resistensi berupa mimikri, hibriditas, dan ambivalensi. **Resistensi mimikri** atau peniruan ditemukan bentuk perlawanan melalui proses mimikri atau peniruan ditunjukkan oleh KHD, dengan keberanian mengungkapkan gagasan membuat KHD menjadi tokoh yang mampu mendobrak intelektual yang semata-mata hanya dimiliki oleh kaum penjajah. KHD

dengan kecerdasan dan keberaniannya mencoba melawan Belanda dengan tulisannya, serta dengan tulisannya tersebut KHD mencoba membangkitkan jiwa patriotisme dan nasionalisme kaum pribumi.

Resistensi hibriditas yang ditemukan dalam tulisan tersebut, KHD sengaja gaya penulisan *nederlander-inlander*, kemerdekaan-perbudakan, kebebasan dan penindasan, merayakan kemerdekaan dan demonstrasi kesetiaan. Gagasan pengandaian sebagai orang Belanda yang menentang perayaan Hari Kemerdekaannya di tanah air penduduk pribumi terjajah menjadi bomerang untuk menghinakan bangsa Belanda sendiri. **Resistensi ambivalensi** dapat ditemukan di satu sisi KHD menginginkan satu hal (menjadi seorang Belanda) dengan memuji-muji keagungan Belanda dan sebaliknya juga menolak/mengingkari hal tersebut dalam waktu yang bersamaan sebagai wujud perlawanan terhadap kaum penjajah (Belanda) yang dinyatakan dengan gaya tulisannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyani, N., & Piliang, W. S. H. (2019). Kritik Sastra Ekologis terhadap Novel-novel Terbaru Indonesia. *Geram*, 7(1), 81–89. [https://doi.org/10.25299/geram.2019.vol7\(1\).2877](https://doi.org/10.25299/geram.2019.vol7(1).2877)
- Ashcroft, B. (2001). *On post-colonial futures: Transformations of a colonial culture*. A&C Black.
- Bandel, K. (2013). *Sastra nasionalisme pascakolonialitas*. Indie Book Corner.
- Bhabha, H. K. (1994). *The location of culture*. Routledge.
- Buntarsono, D. (2017). Buku saku: Tamansiswa badan perjuangan kebudayaan & pembangunan masyarakat. In *Yogyakarta: Perguruan Tamansiswa*. UST-Press.
- Dewantara, K. H. (2013a). *Ki Hadjar Dewantara (Jilid 1 Pendidikan): Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka*. Yogyakarta: UST Press dan Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa.
- Dewantara, K. H. (2013b). *Ki Hadjar Dewantara Jilid 1 (Pendidikan)*. UST Press dan Majelis Luhur Persatuan tamansiswa.
- Edward, S. (2003). *Orientalism: Western conceptions of the Orient*. Penguin Books Limited.
- Efendi, A. N. (2016). Membaca resistensi terhadap kolonialisme dalam cerpen “Samin Kembar” karya Triyanto Triwikromo. *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra UPI*, 16(2), 225–234.
- Foulcher, K., & Day, T. (2008). *Sastra Indonesia modern: kritik postkolonial*. Yayasan Obor Indonesia.
- Gandhi, L. (2019). *Postcolonial theory: A critical introduction*. Columbia University Press.
- Guha, R., & Spivak, G. C. (1988). *Selected subaltern studies*. Oxford University Press.
- Hermaliza, & Ermawati. (2020). Politisasi Bahasa Melalui Eufemisme dalam Program Berita di Televisi. *GERAM (GERAKAN AKTIF MENULIS)*, 8(1), 37–47.
- Lo, J., & Gilbert, H. (1998). Postcolonial Theory: Possibilities and Limitations. *Makalah Pada An International Research Workshop University of Sidney*.
- Loomba, A., & Hadikusumo, H. (2003). *Kolonialisme/pascakolonialisme*. Bentang Budaya.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. California: Sage publications.
- Mukhlis, M. (2018). Analisis Wacana Menurut Teori Theo van Leeuwen Tentang Topik Obat-Obatan Terlarang pada Surat Kabar Riau Pos. *Geram*, 6(1).
- Ratna, N. K. (2008). *Postkolonialisme Indonesia: relevansi sastra*. Pustaka Pelajar.
- Santosa, P. (2012). *Kritik Postkolonial: Jaringan Sastra atas Rekam Jejak Kolonialisme*.
- Selden, R., Widdowson, P., & Brooker, P. (2016). *A reader's guide to contemporary literary theory*. Taylor & Francis.
- Setiawan, R. (2018). Subaltern, Politik Etis, dan Hegemoni dalam Perspektif Spivak. *Poetika: Jurnal Ilmu Sastra*, 6(1), 12–25.
- Spivak, G. C. (2003). Can the subaltern speak? *Die Philosophin*, 14(27), 42–58.
- Susilowati, E. Z. (2019). Resistensi Perempuan Dalam Kumpulan Cerita Tandak Karya

- Royyan Julian (Teori Resistensi-James C. Scott). *BAPALA*, 5(2).
- Wardani, N. E., & Widyahening, C. E. T. (2020). Hybridity, mimicry and ambivalence of female characters in Indonesia: A study from postcolonial novels. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 12(1), 419–431.